

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disebutkan bahwa tugas pokok Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Merumuskan bahan/materi kebijakan, pengkajian, penyusunan, pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan, fasilitasi, harmonisasi, pengawasan monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan,serta pelayanan administratif penyelenggaraan urusan pemerintah umum dibidang Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM, serta Pembinaan Hukum.

Selanjutnya dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan/materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Hukum;
- b. Perumusan penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Hukum;
- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif , pembinaan, serta pelaporan di bidang Hukum;
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka memformulasikan visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis sebagai berikut :

- a. Beberapa kekuatan yang perlu diperhatikan antara lain :
 - Dukungan tupoksi struktur dan organisasi.
 - Peraturan Perundang-undangan.
 - Terjalannya komunikasi internal.
 - Dukungan pimpinan Pemerintah Daerah.
 - Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)

- b. Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain :
 - Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai
 - Jumlah dana yang tersedia belum memadai
 - Sarana dan Prasarana belum memadai
 - Motivasi kerja masih belum optimal
 - Jumlah Pegawai tidak rasional dengan beban tugas
- c. Beberapa ancaman yang perlu diantisipasi antara lain :
 - Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat
 - Lemahnya komitmen aparatur Pemerintah dalam penegakan Supremasi Hukum
 - Belum optimalnya sistem akuntabilitas
 - Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pejabat dan Staf
 - Profesionalisme aparatur belum optimal
- d. Beberapa peluang yang tersedia dan dapat dimanfaatkan antara lain :
 - Era Otonomi Daerah
 - Era Reformasi di segala bidang
 - Era Globalisasi
 - Perkembangan Teknologi dan informasi
 - Pengawasan masyarakat
 - Penegakan Supremasi Hukum

C. STRUKTUR ORGANISASI

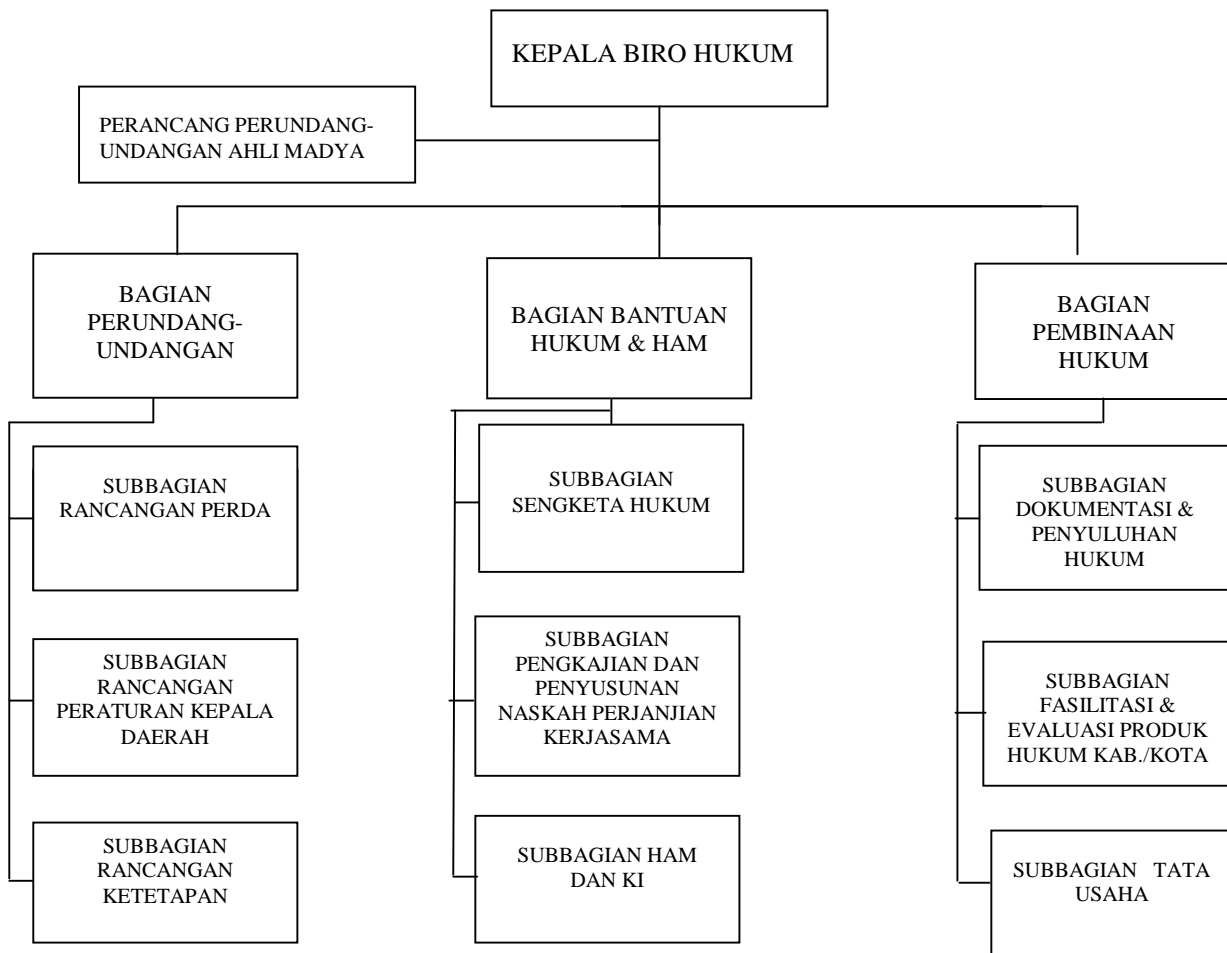
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Hukum Setda Provinsi NTB terdiri dari :

1. Kepala Biro Hukum
2. Bagian Perundang-undangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - b. Sub Bagian Rancangan Peraturan Kepala Daerah
 - c. Sub Bagian Rancangan Ketetapan

3. Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Sengketa Hukum
 - b. Sub Bagian Pengkajian dan Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama
 - c. Sub. Bagian HAM dan KI
4. Bagian Pembinaan Hukum terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
 - b. Sub. Bagian Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota
 - c. Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan uraian pada Tugas Pokok/Fungsi yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dari penjabaran tersebut diatas, Struktur Organisasi Biro Hukum adalah sebagai berikut :

STRUKTUR BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB



D. PERSONALIA

Jumlah Pegawai pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan pangkat/golongan, pendidikan status kepegawaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang. Rincian dan Kondisi Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Eselon

- Eselon II sebanyak 1 orang
- Eselon III sebanyak 3 orang
- Eselon IV sebanyak 9 orang
- Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Madya 1
- Staf PNS sebanyak 18 orang
- PTT sebanyak 1 orang

b. Berdasarkan Golongan

- Golongan IV sebanyak 5 orang
- Golongan III sebanyak 22 orang
- Golongan II sebanyak 4 orang
- PTT sebanyak 1 orang

c. Pegawai Negeri Sipil dan PTT berdasarkan Tingkat Pendidikan

- Strata Dua (S2) sebanyak 7 orang
- Strata Satu (S1) sebanyak 21 orang
- SLTA sebanyak 4 orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

1. Visi dan Misi

Visi Gubernur Nusa Tenggara Barat “NTB GEMILANG” tersebut akan memberikan fokus kepada pencapaian sesuatu dan bukan merupakan jawaban pemecahan atas sesuatu masalah, akan tetapi lebih pada sarana pemecahan masalah yang dihadapi organisasi sehingga secara menyeluruh visi yang akan ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang.

Adapun Misi Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat mengampu pada Misi Gubernur ke Enam : “ AMAN DAN BERKAH MELALUI PERWUJUDAN MASYARAKAT MADANI YANG BERIMAN, BERKARAKTER DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN “.

2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah Persentase Produk Hukum Daerah yang berkualitas

Adapun tujuan Biro Hukum sebagai unit organisasi adalah :

1. Meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah
2. Meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Gubernur
3. Meningkatkan kualitas Rancangan Keputusan
4. Meningkatkan efektifitas penanganan sengketa hukum
5. Meningkatkan kualitas naskah perjanjian Kerjasama
6. Meningkatkan efektifitas penanganan HAM & KI
7. Meningkatkan efektifitas dan kontinuitas Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab./Kota se NTB melalui fasilitasi dan evaluasi
8. Meningkatkan efektifitas dan kontinuitas Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
9. Meningkatkan aksesibilitas Tata Usaha, Tata Kelola Keuangan dan kualitas laporan

3. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Biro Hukum dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan dan/atau bulanan, sehingga sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Hukum adalah :

- Terbentuknya Produk Hukum Daerah
- Meningkatnya Evaluasi/Fasilitasi Produk Hukum Kab/Kota
- Terselenggaranya Dokumentasi dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah
- Tertanganinya Kasus/Sengketa Hukum Litigasi
- Tertanganinya Kasus/Sengketa Hukum Non Litigasi Pemda
- Terlaksananya Pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Penilaian KKP HAM, Rakor dan Sosialisasi HAM, Terinventarisasinya HAKI
- terselesaikannya MoU dan Pengkajian Naskah Perjanjian Kerjasama

4. KEBIJAKAN

- Kerjasama dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal
- Kerjasama dengan Kementerian terkait
Kerjasama dengan Kabupaten/Kota
- Kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait implementasi Keputusan Gubernur dan Sosialisasi Perda/Perkada
- Kerjasama dengan lembaga lain implementasi Keputusan Gubernur
- Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota implementasi Keputusan Gubernur
- Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan alat bukti dan menghadirkan saksi seperti BPN Provinsi NTB, BPN Kab./Kota dan Biro Umum Setda Provinsi NTB
- Ditandatangani naskah perjanjian antara pihak Pemerintah Provinsi dengan pihak Kab./Kota dan pihak ketiga.
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat & Kab./Kota
- Melaksanakan Rakor Produk Hukum secara berkala
- Konsultasi Teknis dengan Kemendagri
- Koordinasi dengan lembaga terkait
- Kerjasama dengan Pemerintah Kab./Kota
- Kerjasama dengan Pusat JDIH dan JDIH Kab./Kota
- Kerjasama dengan LSM dan ORMAS

5. PROGRAM

Program merupakan rangkuman dari beberapa kegiatan pada biro hukum dengan mempertimbangkan kondisi riil dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok dan fungsi, anggaran serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam upaya mewujudkan pelayanan prima pada Biro Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Program Biro Hukum yang ditetapkan adalah :

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

a. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran Strategis : Terbentuknya Produk Hukum Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Terbentuk

- Peraturan Daerah 10 buah
- Peraturan Gubernur 30 buah
- Keputusan Gubernur 700 buah

b. Kajian peraturan perundang-undangan Daerah terhadap peraturan Per-UU-an yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan Per-UU-an Daerah

Sasaran Strategis : Meningkatnya Evaluasi/Fasilitasi Produk Hukum Kab/Kota

Indikator Kinerja : Jumlah Produk Hukum Yang Terevaluasi/ Terfasilitasi

- Perda/Perbup/Perwal 120

c. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Sasaran Strategis : Terselenggaranya Dokumentasi dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Indikator Kinerja : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Terdokumentasi dan Tersosialisasi

- Perda 4 buah

Program Bantuan Hukum dan HAM

a. RANHAM & HAKI

Sasaran Strategis : Terlaksananya Pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Penilaian KKP HAM, Rakor dan Sosialisasi HAM, Terinventarisasinya HAKI

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Penilaian KKP HAM, Rakor dan Sosialisasi HAM, Terinventarisasinya HAKI

15 Dokumen

b. Penanganan Sengketa Hukum di Pengadilan

- Sasaran Strategis : Tertanganinya Kasus/Sengketa Hukum Litigasi
 Indikator Kinerja : Jumlah Kasus/sengketa Hukum litigasi Yang Tertangani
4 Perkara

c. Penanganan Permasalahan-Permasalahan Pemda

- Sasaran Strategis : Tertanganinya Kasus/Sengketa Hukum Non Litigasi Pemda
 Indikator Kinerja : Jumlah Kasus/Sengketa Hukum Non Litigasi Pemda yang tertangani
1 Perkara

d. Pengkajian Naskah MoU & Perjanjian Kerjasama

- Sasaran Strategis : terselesaikannya MoU dan Pengkajian Naskah Perjanjian Kerjasama
 Indikator Kinerja : Jumlah Penyelesaian MoU dan Perjanjian Kerjasama
20 Naskah

B. PERJANJIAN KINERJA

Kegiatan merupakan realisasi lebih lanjut dari pengembangan kebijaksanaan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang pada akhirnya merupakan cerminan dari strategi konkrit organisasi.

Adapun Perjanjian Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Terbentuknya Produk Hukum Daerah
 Indikator Kinerja : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Terbentuk
 Target : 10 Peraturan Daerah
 30 Peraturan Gubernur
 700 Keputusan Gubernur
2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Evaluasi/Fasilitasi Produk Hukum Kab/Kota
 Indikator Kinerja : Jumlah Produk Hukum Yang Terevaluasi/ Terfasilitasi
 Target : Perda/Perbup/Perwal 120
3. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Dokumentasi dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah
 Indikator Kinerja : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Terdokumentasi dan Tersosialisasi
 Target : 4 Perda

4. Sasaran Strategis : Terlaksananya Pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Penilaian KKP HAM, Rakor dan Sosialisasi HAM, Terinventarisasinya HAKI
Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Penilaian KKP HAM, Rakor dan Sosialisasi HAM, Terinventarisasinya HAKI
Target : 15 Dokumen
5. Sasaran Strategis : Tertanganinya Kasus/Sengketa Hukum Litigasi
Indikator Kinerja : Jumlah Kasus/sengketa Hukum litigasi Yang Tertangani
Target : 4 Perkara
6. Sasaran Strategis : Tertanganinya Kasus/Sengketa Hukum Non Litigasi
Indikator Kinerja : Jumlah Kasus/Sengketa Hukum Non Litigasi Pemda yang tertangani
Target : 4 Perkara
7. Sasaran Strategis : terselesaikannya MoU dan Pengkajian Naskah Perjanjian Kerjasama
Indikator Kinerja : Jumlah Penyelesaian MoU dan Perjanjian Kerjasama
Target : 20 Naskah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat dan mengetahui kinerja Biro Hukum, capaian kinerja organisasi yang dilakukan adalah menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan memanfaatkan data yang bersumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari Biro Hukum
- b. Data eksternal yang berasal dari luar Biro Hukum.

Dari data internal maupun eksternal dalam rangka memperoleh data kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten dengan bantuan instrumen formulir pengukuran kinerja kegiatan terlampir dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2020

Jumlah Produk Hukum Daerah yang terbentuk Tahun 2020

Target

- Peraturan Daerah 10 buah
- Peraturan Gubernur 30 buah
- Keputusan Gubernur 700 buah

Realisasi

- Peraturan Daerah 11 buah
- Peraturan Gubernur 87 buah
- Keputusan Gubernur 922 buah

Jumlah Produk Hukum Daerah tahun ini dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Target Kinerja								Realisasi Kinerja							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perda	10	10	10	10	10	10	10	10	11	14	12	12	13	16	14	11
Pergub	37	30	30	30	30	30	30	30	38	43	56	56	69	51	60	87
Keputusan Gubernur	650	700	700	700	700	700	700	700	787	867	952	1136	1046	956	992	922

2. Capaian Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun lalu Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- Terbentuknya Produk Hukum Daerah

Masukan : - Target

- Peraturan Daerah 10 buah
- Peraturan Gubernur 30 buah
- Keputusan Gubernur 700 buah
- Realisasi
 - Peraturan Daerah 11 buah
 - Peraturan Gubernur 87 buah
 - Keputusan Gubernur 922 buah

Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Terbentuk

Hasil : Terbentuknya Perda/Pergub/Keputusan Gubernur

- Terwujudnya aturan hukum yang berkualitas dan efektif

Masukan : - Target 120 Perda/Perbup/Perwal

- Realisasi 155 Perda/Perbup/Perwal

Keluaran : Terevaluasinya Produk Hukum Daerah Kab./Kota

Hasil : Tertata/tidak bertentangnya Produk Hukum Kab./Kota dengan aturan yang baru dan lebih tinggi.

Indikator Kinerja	Target Kinerja								Realisasi Kinerja							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perda/Perpup/Perwal	95	100	100	100	100	100	120	120	110	143	142	139	147	142	247	185

- Terselenggaranya Dokumentasi dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Masukan : - Target 4 Perda

- Realisasi 4 Perda (30 orgx 3 Kab./Kota)

Keluaran : Tersosialisasinya Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur

Hasil : - Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat

- Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
- Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan
- Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- Pergub Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Zoom Meeting

Program Bantuan Hukum dan HAM

- Terlaksananya Pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Penilaian KKP HAM, Rakor dan Sosialisasi HAM, Terinventarisasinya HAKI
 - Masukan : - Target 15 Dokumen
 - Realisasi 15 Dokumen
 - Keluaran : Tersedianya Dokumen Pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Penilaian KKP HAM, Rakor dan Sosialisasi HAM, Terinventarisasinya HAKI
 - Hasil : Dipahaminya masalah HAM serta tertanganinya permasalahan HAM

Indikator Kinerja	Target Kinerja								Realisasi Kinerja							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sosialisasi HAM & Guru	70 psrt	30 Psrt	40 Psrt	2keg /125 psrt	3keg /155 Psrt	120 psrt	15 Dok	15 Dok	65 psrt	95 psrt	50 psrt	2keg /125 psrt	keg/ 155 psrt	5keg/ 200 psrt	18 Dok	15 Dok

- Tertanganinya Kasus/Sengketa Hukum Litigasi
 - Masukan : - Target 4 Perkara
 - Realisasi 6 Perkara
 - Keluaran : terselesaikannya sengketa hukum di Pengadilan
 - Hasil : Adanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat

Indikator Kinerja	Target Kinerja								Realisasi Kinerja							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perkara	10	10	10	10	10	10	4	4	317	11	435	13	11	10	8	6

- Tertanganinya Kasus/Sengketa Hukum Non Litigasi Pemda

Masukan : - Target 4 Perkara

- Realisasi 3 Perkara

Keluaran : terselesaikannya sengketa hukum di Pengadilan

Hasil : Adanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat

Indikator Kinerja	Target Kinerja								Realisasi Kinerja							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perkara	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	8	3

- Terselesaikannya MoU dan Pengkajian Naskah Perjanjian Kerjasama

Masukan : - Target 20 Naskah

- Realisasi 44 Naskah

Keluaran : Terkajinya naskah perjanjian kerjasama Pemda dengan Pihak Ketiga

Hasil : Tersusunnya naskah kerjasama Pemda dengan pihak ketiga

Indikator Kinerja	Target Kinerja								Realisasi Kinerja							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Naskah Perjanjian	40	40	40	40	40	40	20	20	25	38	50	30	60	54	20	44

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTB disusun dan dituangkan dengan didasarkan pada memfokuskan tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi yang ada. Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ada dalam mendukung setiap program dan kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTB.

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan dari target dan realisasi kinerja Biro Hukum Setda Provinsi NTB yang dibebankan melalui program/kegiatan rutin Biro Hukum setiap tahunnya dapat dikatakan mengalami peningkatan dan keberhasilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat perbandingan target dan realisasi setiap tahunnya yang mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan.

Program/kegiatan keberhasilan ini didukung dari beberapa komponen yang ada antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang semakin hari semakin baik dalam pemberian pelayanan.
1. Adanya dukungan yang semakin kuat dari pemerintah dan pihak terkait terhadap peningkatan HAM.
2. Koordinasi internal Biro Hukum yang optimal.
3. Dukungan dari pihak-pihak terkait Badan Dinas PD dan lembaga – lembaga lainnya.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal.
5. Dukungan kebijakan dan peraturan yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan.
6. Dukungan dana untuk melaksanakan program / kegiatan setiap tahunnya relatif semakin membaik.
8. Adanya inovasi program percepatan pelayanan produk hukum

B. REALISASI KEUANGAN

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh dana sebesar untuk

- a. Program Penataan Perundang-undangan
 - Anggaran Rp. 1.740.106.910 DPA Perubahan Rp. 1.034.703.494 realisasi sebesar Rp. 1.023.503.494 sisa anggaran Rp. 11.200.000
- b. Program Bantuan Hukum dan HAM
 - Anggaran Rp. 750.073.940 setelah DPA Perubahan Rp. 554.693.650 realisasi sebesar Rp. 548.393.650 Sisa anggaran 6.300.000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

- Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

- Masukan : - Target Rp. 478.954.234 (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- Realisasi Rp. 475.954.234 (empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah)
- Prosentase 98,92 %

- Keluaran : Tersusunnya Rancangan
- Peraturan Daerah 11 buah
 - Peraturan Gubernur 87 buah
 - Keputusan Gubernur 922 buah

Hasil : Terbentuknya Perda/Pergub/Keputusan Gubernur

- Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Per-UU-an yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan Per-UU-an Daerah

- Masukan : - Target Rp. 416.831.860 (empat ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
- Realisasi Rp. 416.831.860 (empat ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah)
- Prosentase 100 %

Keluaran : Terasilitasi/terevaluasinya Produk Hukum Daerah Kab./Kota

Hasil : Tertata/tidak bertentangnya Produk Hukum Kab./Kota dengan aturan yang baru dan lebih tinggi.

- Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

- Masukan : - Target Rp. 138.917.400 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah)
- Realisasi Rp. 130.717.400 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah)
- Prosentase 94 %

Keluaran : Tersosialisasinya Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur

- Hasil : - Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat

- Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
- Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan
- Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
- Pergub Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Zoom Meeting

Program Bantuan Hukum terdiri dari :

- Rencana Aksi HAM dan KI
 - Masukan : - Target Rp. 51.600.000 (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Realisasi Rp. 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Prosentase 94 %
 - Keluaran : 15 Dokumen Pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Penilaian KKP HAM,
 - Hasil : Tersedianya Dokumen Pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Penilaian KKP HAM, Rakor dan Sosialisasi HAM, Terinventarisasinya HAKI
- Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan
 - Masukan : - Target Rp. 291.237.790 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)
 - Realisasi Rp. 288.287.790 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh)
 - Prosentase 99 %
 - Keluaran : Tertanganinya 6 Kasus/Sengketa Hukum Litigasi
 - Hasil : Adanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat

- Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pemda

- Masukan : - Target Rp. 76.677.930 (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)
- Realisasi Rp. 76.427.930 (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)
- Prosentase 100 %

Keluaran : Tertanganinya 6 Kasus/Sengketa Pemda

Hasil : Adanya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat

- Pengkajian Naskah Perjanjian MoU dan Perjanjian Kerjasama

- Masukan : - Target Rp. 135.177.930 (seratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)
- Realisasi Rp. 135.177.930 (seratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)
- Prosentase 100 %

Keluaran : terselesaikannya 44 MoU dan Pengkajian Naskah Perjanjian Kerjasama

Hasil : Terkajinya naskah perjanjian kerjasama Pemda dengan Pihak Ketiga

BAB IV

PENUTUP

Memperhatikan uraian-uraian diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Biro Hukum, yang ditindak lanjuti dengan program dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) untuk Tahun 2020 cukup berhasil.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Biro Hukum Setda Provinsi NTB dikarenakan :

- a. Kemampuan SDM yang semakin baik dalam memberikan pelayanan.
- b. Adanya komitmen Pemerintah terhadap peningkatan HAM.
- c. Adanya persepsi/koordinasi yang optimal antar bagian.
- d. Adanya dukungan dari Badan/Dinas-dinas yang terkait serta stakeholder.
- e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.
- f. Adanya dukungan/kebijakan dan Regulasi dalam melaksanakan program/kegiatan.
- g. Adanya inovasi percepatan pelayanan produk hukum

Untuk mengantisipasi beberapa kendala dan tantangan yang belum dapat diselesaikan Tahun 2020, maka waktu mendatang diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi kendala/tantangan tersebut sehingga kinerja menjadi lebih baik.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja organisasi :

1. Meningkatkan SDM yang ada dengan diadakannya pelatihan/diklat
2. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam hal pembentukan produk-produk hukum daerah
3. Peningkatan sarana dan prasaran kerja

**REVIEW LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
D. PERSONALIA	4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	5
A. PERENCANAAN KINERJA.....	5
B. PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	10
B. REALISASI KEUANGAN.....	14
BAB IV PENUTUP	18

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama 2020
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran dan pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB hasil Review Inspektorat telah berhasil kami susun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) dan merupakan penilaian serta evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan Misi Gubernur ke Enam yaitu **“Aman dan Berkah melalui Perwujudan Masyarakat Madani yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan”**.

Pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2019-2023 yang dijabarkan dalam bentuk program kerja dan kegiatan Tahun Anggaran 2020, harus diakui dalam pelaksanaannya bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah untuk dapat dilakukan secara sempurna. Namun demikian tidak ada yang tidak dapat dicapai sepanjang semua unsur yang ada baik pada Bagian maupun pada Sub Bagian menyatukan tekad untuk mewujudkan apa yang telah menjadi visi dan misi bersama.

LKjIP yang kami susun ini tidak dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi semua kegiatan secara rinci namun hanya menilai dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis dan relevan dengan Renstra.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin dan dicatat sebagai ibadah serta mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT.

MATARAM, 2021
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI,SH.MH.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19651231 199303 1 135

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan peningkatan pelayanan publik diperlukan instrumen yuridis yang dapat mengimplementasikan segala bentuk kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berorientasi pada terwujudnya visi Gubernur yaitu NTB Gemilang, dengan misi NTB Aman dan Berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas Biro Hukum Setda Provinsi NTB telah menetapkan beberapa rencana strategis untuk menunjang pelayanan tupoksi sebagaimana telah dijabarkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun rencana Strategis Biro Hukum adalah sebagai berikut :

1. Dalam penanganan kasus-kasus Perdata dan Tata Usaha Negara, Biro Hukum dengan segala kemampuan SDM yang ada telah menangani kasus-kasus tersebut dengan baik dan optimal.
2. Penyelesaian produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan. Terhadap peraturan yang bersifat Regeling seperti Perda dan Pergub proses pembahasan/penyelesaiannya sangat tergantung dari dinamika yang ada di DPRD, sedangkan untuk proses penyelesaian pergub lamanya \pm 14 hari, untuk penyelesaian Produk Hukum bersifat Beschikking yaitu Keputusan Gubernur lamanya \pm 7 hari.
3. Membentuk tim kajian evaluasi dan fasilitasi yang bertugas melakukan evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota.
4. Program sosialisasi produk hukum.
5. Peningkatan pelaksanaan RANHAM Provinsi NTB

Demikian ringkasan eksekutif ini kami buat semoga apa yang menjadi rencana kerja dapat terwujud sebagaimana mestinya.

